



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	3 (Tiga)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 19 Januari 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Masukan Tentang Pasokan Kebutuhan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Hadir	:	1. 37 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Bapak Hendra Sinadia; b. Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Ibu Gita Mahyarani; c. Ketua Komite Marketing & Logistik Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Bapak Anton Kristianto; d. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Bapak Haryanto Damanik. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) pada pukul 10.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) pada hari Rabu, 19 Januari 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima

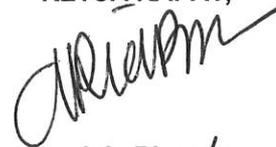
II. CATATAN RAPAT

1. Perlu mekanisme pemantauan (monitoring) pemenuhan DMO (*Domestic Market Obligation*) secara berkala (setiap triwulan) dan besaran DMO perlu disesuaikan dengan kebutuhan domestik yang riil/akurat.
2. DMO untuk perusahaan yang melebihi kewajibannya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang masih kurang belum memenuhi kewajibannya (secara *cluster/grup*) tanpa ada biaya transfer.
3. PLN perlu lebih fleksibel untuk mengambil batubara diluar kualitas yang dibutuhkan (*off-spec*) saat ini, dengan cara *blending* atau *co-firing*, PLN perlu segera merealisasikan fasilitas *blending*.
4. Pemenuhan kebutuhan batubara dibuat secara akurat, tepat dengan memperhatikan safety stock, memenuhi komitmen seperti yang tertuang dalam kontrak (volume dan tata waktu pengiriman).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.51 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



Aria Bima
A-189